

**MENEJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM SENSITIF
BENCANA
(Tuntutan Inovasi dan Kontekstualisasi)**

Nur Said
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus
nursaid@ymail.com

Abstract

This paper discusses the responsibility of education in responding to natural disasters issues that occurred in the last ten years. There are three focus discussion in this paper are: (1) Why is it important educational innovation in the midst of global climate change?, (2) How does the educational innovation model that be relevant in responing the various natural disasters in this country, (3) How does the process of curriculum innovation begins to contribute in part to give an alternative solution for areas prone to disaster as socio-cultural potential of each educational unit?. With a critical analysis of this paper finally concluded some important things: (1) Education was held not in empty space because it becomes a necessity curriculum innovations included in the deal with the issue of natural disasters by strengthening the awareness of the importance of disaster mitigation, namely the efforts to reduce disaster risks, one of whom through awareness and capacity-building efforts face the threat of natural disasters, (2) One form of mitigation is the importance of trauma healing, namely minimizing trauma and post-disaster fear either for himself or another person; (3) Every teacher must be able to portray himself as the developer of the curriculum and as an innovator of curriculum so that each educational unit capable of formulating their own curriculum according to the potential of history, culture and geography of each (local genius).

Keywords: Trauma Healing, Curriculum Management, Disaster

Abstrak

Makalah ini membahas mengenai tanggung jawab pendidikan dalam menanggapi isu-isu bencana alam yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir. Ada tiga pokok permasalahan yang dibahas dalam makalah ini, adalah : (1) Mengapa inovasi pendidikan penting di tengah-tengah perubahan iklim global, (2) Bagaimana model inovasi pendidikan yang relevan dalam merespon berbagai bencana alam di negeri ini, (3) Bagaimana proses inovasi kurikulum dapat kontribusi dalam memberikan solusi alternatif untuk daerah rawan bencana sebagai potensi sosial budaya masing-masing satuan pendidikan?. Dengan menggunakan analisis kritis dalam artikel ini, beberapa hal penting yang dapat disimpulkan antara lain : (1) Pendidikan diselenggarakan tidak dalam ruang kosong karena kurikulum sebagai komponen penting dalam pendidikan juga menuntut adanya inovasi-inovasi progresif termasuk dalam hal mitigasi bencana, yaitu upaya untuk mengurangi risiko bencana, yang salah satunya melalui upaya penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana alam, (2) salah satu bentuk mitigasi adalah pentingnya penyembuhan trauma, yaitu meminimalkan trauma dan pasca bencana ketakutan baik untuk sendiri atau orang lain , (3) setiap guru harus mampu memerankan dirinya sebagai pengembang kurikulum dan sebagai inovator kurikulum sehingga setiap satuan pendidikan mampu merumuskan kurikulum sendiri sesuai dengan potensi sejarah, budaya dan geografi masing-masing (nilai-nilai lokal).

Kata-kata Kunci: Trauma Healing, Manajemen Kurikulum, bencana

Pendahuluan

Dalam sepuluh tahun terakhir negeri kita dilanda berbagai bencana alam yang sangat mengerikan. Sebut saja bencana tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004, gempa bumi Yogyakarta 27 Mei 2006, gempa bumi Jawa Barat 2 September 2009, gempa Sumatra Barat (Padang) pada 30 September 2009 serta baru-baru ini tahun 2010 yang lalu letusan Merapi yang telah meluluh-lantahkan sejumlah perkampungan di Yogyakarta dan sekitarnya. Bencana alam lain seperti banjir juga sering mengejutkan sebagaimana terjadi belum lama ini di sepanjang jalan pantura Demak, Kudus, Pati, Rembang dan sekitarnya.

Dari berbagai kejadian bencana tersebut ratusan bahkan ribuan nyawa melayang tak terselamatkan, ribuan rumah dan tempat ibadah hancur serta sarana dan prasarana umum juga lumpuh. Yang lebih menyayat hati diantara korban tersebut mengalami trauma pascagempa, sehingga perlu mendapat penanganan secara khusus terutama yang melibatkan dunia pendidikan.

Yang tak kalah menyedihkan dari berbagai tempat yang mengalami kejadian bencana dalam berbagai kasus, seringkali berdampak terganggunya proses belajar mengajar sehingga pendidikan mengalami *abnormal* karena rusaknya sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan di daerah tersebut juga seringkali mengalami korban sehingga harus mengurus keluarganya yang sedang menderita juga. Bagaimana dunia pendidikan harus meresponnya?

Fullan dan Stiegelbauer, dalam buku *The New Meaning of Education Change* memberikan penegasan menarik dalam konteks menghadapi fenomena bencana alam dalam hubungannya dengan perubahan pendidikan. Menurut Fullan dan Stiegelbauer (1991: 17) setidaknya ada (3) tiga sumber perubahan pendidikan yaitu: (1) karena bencana alam (*natural disaster*); (2) pengaruh faktor luar (*external forces*) seperti adanya perkembangan teknologi, pergeseran nilai dan juga fenomena perpindahan penduduk; (3) kontradiksi internal (*internal contradiction*) seperti akibat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mengakibatkan pembentukan pola-pola sosial baru dan sistem nilai dalam suatu komunitas/kelompok orang.

Paper singkat ini akan mencoba membahas tiga fokus masalah: (1) Mengapa inovasi pendidikan itu penting di tengah terjadinya perubahan iklim global? ; (2) Bagaimana inovasi pendidikan yang relevan untuk merespon berbagai kejadian bencana alam di negeri ini;

(3) Bagaimana proses inovasi kurikulum dimulai agar berkontribusi dalam turut memberi solusi alternatif bagi daerah rawan bencana sesuai potensi sosial-budaya di setiap satuan pendidikan?

1. Mengapa Inovasi Dalam Pendidikan Penting?

Secara umum, inovasi didefinisikan sebagai suatu ide, praktek atau obyek yang dianggap sebagai sesuatu yang baru oleh seorang individu atau satu unit adopsi lain.) mendefinisikan inovasi sebagai suatu ide, hal-hal praktis, metode, cara, atau barang buatan manusia sebagaimana teknologi yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang baik berupa invensi (temuan yang benar-benar baru) atau diskoveri (suatu hal yang sudah ada tetapi belum diketahui orang sebelumnya) yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi manusia (Roger, 1983: 11; Ibrahim, 1988: 41-42).

Karena itu ketika kondisi sosial-budaya mengalami perubahan baik diakibatkan oleh perkembangan TIK maupun akibat bencana alam atau perubahan iklim global, maka pendidikan juga membutuhkan inovasi. Pendidikan diselenggarakan pada hakekatnya tak lepas dari dua proses: *pertama* proses hominisasi, yaitu memposisikan manusia sebagai makhluk hidup di dalam dunia atau ekologinya. Karena itu pendidikan perlu mengkondisikan peserta didik sadar akan jatid dirinya yang hidup dalam suatu bangsa dengan suatu ikatan budaya dan alam sekitarnya. Ketika peserta didik hidup dalam lingkungan yang rawan gempa atau bencana, maka pendidikan juga harus mengkondisikan pentingnya strategi budaya dalam mengurangi dampak bencana. *Kedua*, proses humanisasi, memposisikan manusia sebagai makhluk yang bermoral (akhlak). Sebagai makhluk bermoral, manusia tak sekedar hidup, tetapi hidup untuk mewujudkan eksistensi sebagai manusia yang berbudaya berikut kesadaran religiusitas yang dimilikinya serta memahami bagaimana etika bersikap dan berperilaku dengan alam semesta agar alam juga ramah dengan manusia (H.A.R. Tilaar, 1985: 54).

Lebih jauh John Dewey (1800an) sejak awal juga menegaskan pentingnya menggabungkan lokasi (*place*) dengan praktek pendidikan. Menurutnya pola ini akan mampu mendukung peserta didik dalam meningkatkan ketrampilan berpikir kritis serta memberi kesempatan untuk menjadi pribadi sosial yang kuat (*the development of critical thinking skills, the opportunity for students to develop as whole social beings*) (Woodhouse, 2001).

Dalam konteks inilah Dewey (2004: 47) praktek pendidikan harus mampu memerankan dirinya sebagai kontrol sosial dengan mengedepankan prinsip interaksi dan kontinuitas.

Karena itu inovasi pendidikan menjadi penting di tengah kondisi sosio-ekologis yang sedang mengalami perubahan secara terus menerus. Inovasi pendidikan seperti apa yang cocok untuk negeri yang rawan gempa seperti Indonesia ini? Rogers (1983) mengemukakan lima karakteristik inovasi yang meliputi: 1) keunggulan relatif (*relative advantage*), 2) kesesuaian (*compatibility*), 3) kerumitan (*complexity*), 4) kemampuan diuji cobakan (*trialability*) dan 5) kemampuan diamati (*observability*).

Keunggulan relatif adalah derajat dimana suatu inovasi dianggap lebih baik/unggul dari yang pernah ada sebelumnya. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi, seperti segi ekonomi, *prestise social*, kenyamanan, kepuasan dan lain-lain. Semakin besar keunggulan relatif dirasakan oleh pengadopsi, semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi.

Kompatibilitas adalah derajat dimana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu dan kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh, jika suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka inovasi itu tidak dapat diadopsi dengan mudah sebagaimana halnya dengan inovasi yang sesuai (*compatible*).

Kerumitan adalah derajat dimana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi tertentu ada yang dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi dan ada pula yang sebaliknya. Semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi, maka semakin cepat suatu inovasi dapat diadopsi

Kemampuan untuk diuji cobakan adalah derajat dimana suatu inovasi dapat diuji-coba batas tertentu. Suatu inovasi yang dapat di uji-cobakan dalam seting sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, agar dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi sebaiknya harus mampu menunjukkan (mendemonstrasikan) keunggulannya.

Kemampuan untuk diamati adalah derajat dimana hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil dari suatu inovasi, semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut mengadopsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar keunggulan relatif; kesesuaian (*compatibility*); kemampuan untuk diuji cobakan dan

kemampuan untuk diamati serta semakin kecil kerumitannya, maka semakin cepat kemungkinan inovasi tersebut dapat diadopsi.

Sementara Rudduck (1991: 26) dalam hubungannya dengan gagasan pendidikan menegaskan pentingnya memperhatikan modal budaya (*cultural resources*) dalam merencanakan pendidikan; mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Karena itu ketika anak-anak sedang trauma akibat bencana alam, pendidikan juga tidak bisa diselenggarakan secara normal. Karena itu perlu menawarkan strategi inovasi pendidikan yang mampu memberikan solusi alternatif bagi anak-anak korban bencana agar terhindar dari trauma yang berkepanjangan dan bisa tetap menjadi manusia pembelajar secara mandiri.

2. Urgensi Pendidikan Darurat dan *Trauma Healing*

Untuk membahas ini ada baiknya merenungkan dampak dari sebuah bencana yang telah menjadi isu nasional yang digambarkan dalam sebuah koran nasional sebagai berikut:

Warga Pulau Koto, Nagari Tandikek, Kabupaten Padangpariaman, Sumatra Barat (Sumbar), membutuhkan tenda-tenda untuk sekolah darurat. Ini karena bangunan sekolah yang ada di permukiman setempat tertimbun tanah longsor saat gempa. Masyarakat Pulau Koto meminta bangunan sekolah darurat hendaknya bisa segera didirikan. Sebab, adanya kegiatan belajar itu akan bisa mengobati trauma yang hingga kini masih dialami anak-anak usia sekolah (Republika, 5 Oktober 2009).

Kutipan berita di atas menunjukkan bahwa bencana alam sebagaimana gempa dan sejenisnya jelas melahirkan trauma yang berkepanjangan bagi anak-anak, karenanya pendidikan juga harus meresponnya dengan melahirkan formula inovasi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Saat gempa Sumatra Barat sudah diselenggarakan antara lain dari Organisasi Internasional Dana Anak-Anak PBB (*Unicef-United Nations Children's Fund*), juga dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) (Republika 6 Oktober 2006).

Namun bagaimana pendidikan di sekolah darurat harus diselenggarakan tampaknya belum menemukan konsep yang jelas. Dalam kasus berbagai bencana alam, terdapat resiko psikologis akibat gempa bumi yang dialami oleh individu misalnya mengalami kehilangan sumber daya yang bernilai, seperti kehilangan orang yang dicintai, harta benda yang dimiliki,

hubungan sosial dan komunitas atau ketika kehilangan pegangan hidupnya akan menyebabkan stress dan trauma sebagaimana terlihat dalam berbagai siaran berita di media massa dan elektronik. Oleh karena itulah, di samping aktivitas tanggap darurat hal yang perlu dipikirkan adalah penanganan resiko psikologis.

Pada beberapa kejadian bencana di Indonesia kegiatan *trauma healing* sudah jamak dilakukan. Namun tetap perlu diingatkan kembali bahwa anak-anak perlu mendapatkan perhatian serius ketika dihadapkan pada bencana alam secara tiba-tiba. Dalam berbagai liputan bencana alam baik melalui media elektronik maupun koran seringkali anak-anak menunjukkan rasa ketakutan yang paling mendalam hingga menangis tersedu-sedu memohon perlindungan kepada siapapun yang ada disampingnya. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai gangguan kecemasan pascatrauma (PTSD) yang merujuk pada gangguan psikologis dan luka emosional yang dialami oleh individu ketika mengalami suatu peristiwa tragis dan luar biasa (Schiraldi, 2000).

Gangguan kecemasan pascatrauma bagi anak yang mengalami bencana alam apapun bentuknya dapat dikategorikan sebagai suatu gangguan kecemasan dengan indikator dan ciri-ciri diagnostik tertentu yang berbeda dengan kecemasan biasa. Gangguan kecemasan pascatrauma pada anak-anak jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai bentuk gangguan antara lain: (1) Aspek fisik antara lain: suhu badan meninggi (*tension*), menggigil (*trembling*), badan terasa lesu (*fatigue*), mual-mual (*tingling*), pening (*nausea*), ketidakmampuan menyelesaikan masalah (*digestive track problem*), sesak napas (*rapid breathing*), panik (*event panic attack*); (2) Aspek emosi, antara lain: hilangnya gairah hidup (*moodiness*), ketakutan (*fear*), dikendalikan emosi (*exaggerated emotions*), dan merasa rendah diri (*loss of confidence*). Aspek Mental antara lain: kebingungan (*confussion*), tidak dapat berkonsentrasi (*inability to concentrate*), tidak mampu mengingat dengan baik (*remember*), tidak dapat menyelesaikan masalah (*lack decision making*); (3) Aspek Perilaku antara lain: sulit tidur, kehilangan selera makan, makan berlebihan, banyak merokok, minum alkohol, menghindar, sering menangis, tidak mampu berbicara, tidak bergerak, gelisah, terlalu banyak gerak, mudah marah, ingin bunuh diri, menggerakkan anggota tubuh secara berulang-ulang, rasa malu berlebihan, mengurung diri, menyalahkan orang lain. Aspek Spiritual antara lain: putus asa (*discouragement*), hilang harapan (*hopeless*), menyalahkan Tuhan,

berhenti ibadah, tidak berdaya (*despair*), meragukan keyakinan, dan tidak tulus (Pranyono, 2009).

Dengan demikian pendidikan darurat lebih urgen untuk diarahkan pada upaya-upaya *trauma healing* yang lebih dibutuhkan oleh anak-anak paska bencana alam. Dalam pendidikan darurat setidaknya perlu memperhatikan 3 (fase) penting yakni: (1) Fase akut (*the Acute Phase*), yakni kegiatan pendidikan yang dilakukan secara menghibur (*features recreation activities*) baik dalam program membaca maupun berhitung. (2) Fase stabilisasi (*the Stabilization Phase*) yaitu ketika pendidikan secara formal sudah dimulai kembali meski dalam keadaan yang sederhana; (3) Fase rekonstruksi (*the Reconstruction Phase*) yaitu ketika sistem pendidikan sudah mulai dibangun kembali paska bencana (Marc Sommers, 2003).

Dengan demikian dalam tiga fase pendidikan darurat tidaklah cukup hanya mengandalkan pendidikan formal, apalagi pada tahap akut. Pelibatan pendidikan non-formal menjadi sebuah kebutuhan. Maka Sommers (2003) menegaskan bahwa *“Education in emergencies is the formal and nonformal education provided to children and youth whose access to national or community education systems has been destroyed by war or other humanitarian calamities”*.

Karena itu inovasi pendidikan baik formal maupun non-formal untuk kepentingan *trauma healing* perlu memperhatikan dalam kondisi darurat yang perlu diperhatikan yaitu: (1) kesehatan publik, (2) pendidikan damai dan kebersamaan, (3) keselamatan dan keharmonisan lingkungan demi keselamatan publik, (4) kegiatan rekreasi psikosial yang membantu anak-anak segera pulih dari trauma.

Sebagaimana disinggung oleh Fullan (1991: 32-37) bahwa bahwa perubahan pendidikan tak lepas dari pertimbangan dua makna: (1) makna subyektif (*the subjective meaning of educational change*) yakni menyangkut pengalaman peserta didik sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya: (2) makna obyektif (*the obyective meaning of educational change*), yakni mencermati perubahan pendidikan dengan pendekatan multidimensi (*multidimentional*).

Karena itu ketika pendidikan darurat diselenggarakan di lokasi bencana alam, maka inovasi pendidikan juga harus dilakukan dengan mengedepankan dua makna penting tadi, sehingga pendidikan yang ada tetap mengakar sesuai kondisi sosial,

budaya, dan keadaan alam yang dialami oleh peserta didik. Dengan demikian pendidikan darurat untuk kepentingan *trauma healing* menjadi bagian esensial bagi masa depan pendidikan kita. Apalagi pendidikan darurat juga bagian dari komitmen *education for all* (EFA) sejak konferensi Senegal tahun 2000.

Dengan demikian bagaimana setiap satuan pendidikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan juga bagian dari masyarakat global harus memposisikan dirinya di tengah geopendidikan yang sarat dengan kerawanan bencana ini? Tak lain dan tak bukan sekolah juga perlu merespon dengan melibatkan seluruh komponennya terutama para guru dalam posisinya sebagai perencana, pengembang dan sekaligus pelaksana kurikulum (*kurikulum leadership*).

3. Menejemen Kurikulum Sensitif Bencana

Dalam konteks ini menjadi relevan merenungkan pernyataan seorang pakar kurikulum Oliva (1992:39-41) yang menegaskan bahwa *“curriculum is a product of its time, curriculum responds to and is changed by social forces, philosophical positions, psychological principles, accumulating knowledge, and educational leadership at its moment in history.”*

Pernyataan di atas memberikan isyarat pentingnya kurikulum dibangun tak sekedar sebagai kumpulan materi (*content*) yang berbasis pada buku-buku teks teoritis (*teks-based curriculum*). Namun yang terpenting kurikulum harus merupakan produk dari perenungan dari situasi semangit zamannya. Kurikulum harus merupakan respon atas berbagai tuntutan perubahan sosial, posisi landasan filsafat yang relevan, prinsip-prinsip teori psikologi yang sesuai perkembangan peserta didik/mahasiswa, serta merupakan akumulasi pengetahuan yang mampu mendorong kemandirian dan kepemimpinan bagi individu dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya.

Dalam konteks kurikulum jenjang pendidikan dasar dan menengah beberapa sekolah sudah mulai responsif mengintegrasikan materi-materi *“Mitigasi Bencana”* yang mencoba memperkenalkan kepada siswa langkah-langkah antisipatif peserta didik agar bisa memahami bahaya bencana dan bisa menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Sebanyak 11 kabupaten/kota di Aceh mulai menerapkan kurikulum bencana di tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidayah (MI). Sementara Kotamadya Bandung materi mitigasi bencana masuk bagian dari mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di Sekolah

Dasar dan Menengah. Sedangkan di Kabupaten Bantul dan Sukoharjo teknik mitigasi bencana tidak hanya disampaikan dalam ruang kelas tetapi juga melalui *learning by doing* dengan didemonstrasikan di luar kelas (Serambi Indonesia, 2/1/2011; Paresti, dkk., 2008; Hayati, 2007: 937-947).

Karena itu dengan memegang prinsip pengembangan kurikulum seperti di atas serta begitu responsifnya sebagian dunia pendidikan di sejumlah satuan pendidikan (sekolah) di daerah yang telah menjadi korban bencana maka semangat tersebut perlu dikembangkan pula dalam jangkauan yang lebih luas termasuk pada sekolah-sekolah di sepanjang pantai utara seperti Kudus, Pati, Demak, Rembang dan sekitarnya yang hampir setiap tahun menjadi *ölangganano* bencana banjir.

Kalau kalangan pesantren dengan kyai dan santrinya yang selama ini bergulat dengan orientasi fiqh yang semula cenderung melihat ajaran Islam secara *öhitam-putihö*, halal-haram dan seterusnya, akhir-akhir ini mereka telah mulai bersemangat merespon isu lingkungan hidup dan fenomena bencana. Hal ini paling tidak ditunjukkan dalam penelitian Rubaidi (2009) dimana para kyai melalui berbagai *bahstul masail* (tradisi mencari jalan keluar *fiqhiyyah* dalam merespon isu-isu terkini termasuk dalam merespon berbagai masalah bencana alam) telah secara pro aktif mendiskusikan dengan bersumber pada kitab-kitab salafiyah (klasik) tentang hak dan kewajiban menjaga dan memanfaatkan alam bagi kehidupan. Hal ini memang menjadi tantangan bagi para agamawan karena Islam dihadirkan untuk memberi tanggung jawab kosmik bagi umat manusia (Husein, 2007: 1-2). Dengan demikian dalam perseptif ini para kyai dan santrinya yang sering diklaim sebagai kalangan tradisional telah menunjukkan begitu respek dan peduli dengan isu-isu aktual masalah bencana alam.

Untuk itu dunia akademik sebagaimana sekolah dan juga perguruan tinggi yang lebih akrab dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern dan teknologi informasi dan komunikasi tentu memiliki tanggung jawab yang lebih dalam turut mengembangkan kurikulumnya yang lebih kontekstual dan berbasis pada realitas. Bagaimana posisi kurikulum dalam praksis pendidikan dalam pembelajaran?

Menurut Hasan (tt & 2007) dalam pengertian "*intrinsic*" kependidikan maka kurikulum adalah jantung pendidikan. Ini berarti bahwa semua gerak kehidupan kependidikan yang dilakukan sekolah didasarkan pada apa yang direncanakan

kurikulum. Kehidupan di sekolah adalah kehidupan yang dirancang berdasarkan apa yang diinginkan kurikulum. Pengembangan potensi peserta didik menjadi kualitas yang diharapkan adalah didasarkan pada kurikulum. Proses belajar yang dialami peserta didik di kelas, di sekolah, dan di luar sekolah dikembangkan berdasarkan apa yang direncanakan kurikulum. Dengan demikian kurikulum adalah dasar dan sekaligus pengontrol terhadap aktivitas pendidikan. Tanpa kurikulum yang jelas maka kehidupan pendidikan di suatu lembaga menjadi tanpa arah dan tidak efektif dalam mengembangkan potensi peserta didik menjadi kualitas pribadi yang sesuai kompetensi yang diinginkan.

Kurikulum tak cukup hanya hanya membatasi diri pada persoalan pendidikan dalam pandangan perenialisme atau esensialisme yang sekedar melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai lama tanpa memperhatikan kecenderungan problematika masyarakat. Kondisi ini terjadi ketika proses pembelajaran hanya hanya menyampaikan materi isi pengetahuan (*transfer of knowledge*) sebagaimana kurikulum *õsubyek akademikõ* yang berlangsung selama puluhan tahun ketika kebijakan pendidikan masih sentralistik. Kondisi ini telah menyebabkan sekolah bagai *menara gading* yang tidak terjamah oleh keadaan masyarakat dan tidak berhubungan dengan masyarakat.

Kondisis sekolah seperti itu sangat jelas dirasakan oleh komunitas *Sedulur Sikep* atau populer disebut komunitas Samin sebagaimana diungkapkan oleh Gunritno, pemuda penggerak Samin ketika menghadapi ancaman pembangunan industri semen di daerah Sukolilo Pati yang mengancam keseimbangan alam sebagai berikut (Said, 2010):

“Wong-wong sing sekolah malah dadi penonton? Wong Sikep kan sering dianggep wong sing tertinggal, dalile yo mung pokoke...Ayolah itung-itungan karo pihak pemkab, anane pabrik semen iku, wong pira sing disejaterahno? Nganti kapan? Aku yo tak gawe itungan. Kesejahteraan sing berkelanjutan iku kaya apa?”

Orang-orang yang berpendidikan di sekolah malah menjadi penonton? Orang *Sikep* seringkali dianggap sebagai kelompok tertinggal, sehingga yang dikedepankan adalah *õpokokeõ* (pokoknya, anti perhitungan *-pen*). Silahkan Pemkab membuat kalkulasi, biar kami juga membuat kalkulasi tandingan. Keberadaan pabrik semen itu bisa

mensejahterakan siapa saja dan dalam jangka waktu berapa lama? Kesejahteraan yang berkelanjutan itu seperti apa?

Apa yang dirasakan Gunritno sebagai representasi komunitas Samin yang selama ini diklaim sebagian kalangan sebagai orang *nglutuk* (kampungan), tidak sekolah tentu seharusnya membuat malu dunia sekolahan yang selama ini dianggap sebagai institusi yang menggembeleng para kaum muda terpelajar tetapi ternyata kurang respek -untuk tidak mengatakan buta dan tuli- atas masalah yang mengancam masa depan kelestarian lingkungan.

Bagi komunitas samin *õsawah adalah buku dan cangkul adalah gurunya.õ* Prinsip tersebut telah menjadi semacam landasan pendidikan berbasis realitas bagi kelompoknya sebagaimana dikedepankan oleh Dewey (2004). Dengan prinsip seperti itu ternyata telah membuat komunitas Samin tumbuh kejujurannya untuk selalu mencari dan menemukan sesuatu yang *demunung*, anti cara-cara yang menggunakan jalan pintas (*nrabas*) (Said, 2009).

Agar terhindar dari ancaman sekolah yang bak *menara gading*, maka kurikulum harus memperhatikan tuntutan masyarakat dan problema masyarakat harus dianggap sebagai tuntutan, menjadi kepedulian dan masalah kurikulum. Dalam dalam konteks ini adalah pentingnya kurikulum merespon problem lingkungan hidup sebagaimana fenomena penggundulan di lereng gunung muria, bencana banjir dan bencana alam lainnya yang bisa mengancam masyarakat kapanpun.

Untuk kepentingan ini perlu memahami kurikulum paling tidak dalam tiga posisi. *Pertama* adalah posisi kurikulum sebagai "*construct*" yang dibangun untuk mentransfer apa yang sudah terjadi di masa lalu kepada generasi berikutnya untuk dilestarikan, diteruskan atau dikembangkan sebagaimana dalam pandangan filosofis perenialisme dan esensialisme. *Kedua* adalah posisi kurikulum sebagai jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang berkenaan dengan pendidikan sebagaimana dalam filosofi progresivisme. Sedangkan posisi *ketiga* memandang kurikulum untuk membangun kehidupan masa depan dimana kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan berbagai rencana pengembangan dan pembangunan bangsa dijadikan dasar untuk mengembangkan kehidupan masa depan (Hasan, tt).

Pemetaan kurikulum dalam tiga posisi tersebut bukan berarti untuk memilih salah satu dan menafikan yang lain, akan tetapi justru menunjukkan pentingnya tiga posisi kurikulum tersebut justru terakomodasi sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat berikut persoalan yang dihadapinya. Hal ini sekaligus sebagai pertimbangan untuk menyusun strategi inovasi kurikulum mengingat begitu kompleksnya ketika proses kurikulum dikembangkan. Unruh dan Unruh (1984:97) menegaskan bahwa proses pengembangan kurikulum adalah: *a complex process of assessing needs, identifying desired learning outcomes, preparing for instruction to achieve the outcomes, and meeting the cultural, social, and personal needs that the curriculum is to serve.*

Kata kunci penting yang perlu diperhatikan dalam penegasan di atas adalah bahwa pengembangan dan inovasi kurikulum harus diselenggarakan dengan memperhatikan cita-cita (tujuan) pendidikan yang harus mengakomodasi aspek sosial, budaya dan kebutuhan psikologis peserta didik yang unik.

Keleluasan ruang inovasi dalam hal ini sesungguhnya diberikan kepada setiap satuan pendidikan melalui kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sudah diberlakukan sejak tahun 2006. KTSP adalah produk dari inovasi kurikulum, namun tuntutan inovasi implementasi/modifikasinya adalah sebuah keniscayaan karena menurut Print (1993: 218-219) hal ini tak lepas dari tuntutan faktor kontekstual baik dari faktor peserta didik, sumber belajar (*resources*), perbedaan guru, atau adanya masukan dari wali peserta didik.

Karena itu ketika dalam lingkungan satuan pendidikan sedang mengalami kerawanan bencana dengan segala macamnya baik dalam bentuk letusan merapi, tsunami, gempa bumi, banjir atau yang lainnya, maka sekolah juga perlu mengakomodasinya sebagai pertimbangan utama dalam inovasi kurikulum. Dalam konteks inovasi kurikulum yang peka dengan pendidikan lingkungan hidup perlu memperhatikan beberapa hal antara lain: (1) Pemahaman mengenai budaya silang yakni perlunya memberikan perspektif yang berbeda dalam melihat suatu persoalan; (2) Pembelajaran holistik yang membawa berbagai disiplin ke suatu isu lingkungan meliputi berbagai pendekatan dalam pembelajaran; (3) Pelibatan potensi masyarakat dengan menjalin hubungan yang akrab antara lingkungan masyarakat dengan sekolah; (4) pemahaman konsep-konsep dasar lingkungan dan permasalahan di sekitarnya (Hayati, 2007: 943).

Dengan prinsip-prinsip tersebut maka pengembangan dan inovasi kurikulum bisa dilakukan dengan mengedepankan; (1) Pendekatan studi berorientasi lokal dan global secara integratif. Karena itu pemahaman akan nilai-nilai kearifan lokal (*local genius*) yang berfungsi secara universal (*global ethics*) perlu dikenalkan kepada peserta didik; (2) Menfokuskan pada dunia perspektif lingkungan yang menyerap sudut pandang secara interdisipliner; (3) pembelajaran diselenggarakan sebagai landasan perilaku etis dalam pengembangan perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungannya; (4) Pentingnya *cooperative learning* untuk memahami peningkatan pluralitas masyarakat berikut lingkungannya (Hayati, 2007: 943; Said, 2010: 182-183).

Kurikulum yang dikembangkan dengan mempertimbangkan potensi sosial budaya dan keunikan peserta didik di satuan pendidikannya masing-masing akan melahirkan KTSP yang membumi dengan karakter dan keunggulan *best practice* yang dinanti oleh banyak pihak.

Beberapa KTSP yang unik dan unggul misalnya SMU Plus Muthahhari Bandung yang memiliki semboyan "Sekolah para Juara". Salah satu program yang unik adalah "Spiritual Camp" yang dimana guru mengajak sejumlah peserta didik untuk menginap di keluarga miskin dan membaur mengikuti *daily life* mereka sebagai upaya menumbuhkan empati dan kecerdasan sosial. Ada juga SMU Mutiara Bunda Bandung yang merekayasa kurikulum inklusif dengan peserta didik dari anak berkebutuhan khusus maupun anak-anak normal. Di Semarang ada Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dikembangkan oleh Guru Ciptono yang membuat SLB tersebut mampu mengantarkan anak-anak ABK berprestasi sesuai kecerdasannya masing-masing sehingga anak-anak yang normal sekalipun tertarik mengikuti SLB yang digagas oleh Ciptono. Di Salatiga ada SMP Qoryah Thoyyibah yang memberikan dimensi kebebasan kreatif peserta didik untuk belajar bersama alam sehingga telah membuat sekolah tersebut meraih banyak prestasi nasional di bidang sastra dan teknologi informasi (TI). Di Kudus ada MTs Tahfidz Yanbu'ul Qur'an yang mulai diakui nasional karena menjadikan *ulumul Qur'an* sebagai ciri khas yang diperkaya dengan kompetensi bahasa asing seperti Bahasa Arab dan Bahasa Inggris yang diharapkan melahirkan ilmuan yang memiliki kesalehan transformatif. Ada juga MA TBS dan MA Qudsiyah Kudus yang berhasil melakukan inovasi implementasi kurikulum dengan menjadikan nilai-nilai salafiyah

sebagai basis pengembangannya sehingga peserta didik sejak dini telah akrab dengan kitab kuning dan nilai-nilai tradisi salaf dengan berprinsip melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik (*al-muhafadzatu 'ala alqadimi al shalih wa al akhdzu biljadidi alashlah*).

Untuk menghasilkan inovasi implementasi kurikulum yang khas dan unggul tak hanya dibutuhkan kerja keras tetapi perlu kerja cerdas antar sesama komponen pengembang kurikulum mulai dari kepala sekolah, guru dan semua aparat sekolah mulai dari proses formulasi ide hingga proses konstruksi kurikulum sehingga menjadi dokumen yang siap diimplementasikan. Tak mungkin menghasilkan konsep pengembangan KTSP yang unggul kalau para guru masih mempercayakan KTSP kepada pihak lain di luar sekolahnya (*outsider*) dengan sistem pesanan. Bagaimana sekolah mau maju dan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif kalau konstruk KTSP harus diserahkan (dipesan) dari pihak ketiga yang tidak memahami karakteristik potensi sosial, budaya, ekonomi dan geografis dimana sekolah itu berada? Sebuah pertanyaan yang patut direnungkan oleh semua komponen penyelenggara pendidikan di setiap sekolah.

Maka di tengah situasi yang sedang mengalami kerawanan bencana terutama di daerah pantura yang hampir setiap tahun dilanda banjir dan gempa bumi yang terkadang datang secara tiba-tiba saatnya setiap satuan pendidikan mulai mendesain kurikulum dengan berbasis pada kepekaan lingkungan hidup sebagaimana kurikulum layanan khusus dalam menghadapi bencana alam. Masalah ini dapat dijadikan sebagai pintu masuk (*entry point*) setiap satuan pendidikan untuk melakukan inovasi kurikulum yang lebih kontekstual dengan berbasis pada lokasi.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendidikan diselenggarakan tak lepas dari upaya pembudayaan dan pemberdayaan. Dengan upaya pembudayaan, pendidikan akan menyangkut pelestarian, pembiasaan dan pemantapan nilai-nilai moral baik dalam hubungannya dengan Sang Pencipta, sesama manusia dan juga dalam berinteraksi dengan alam. Sementara dengan upaya pemberdayaan, pendidikan diharapkan mampu

- mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang berkesadaran kritis sehingga mampu memposisikan dirinya di tengah masyarakat sebagai agen perubahan (*agen of social change*) yang respek atas problematika yang dihadapi umat manusia termasuk ketika dihadapkan pada ancaman bencana alam (*natural disaster*).
2. Pendidikan diselenggarakan tidak dalam ruang kosong tetapi tak lepas dari konstruk sosial, budaya dan historisitasnya, karena itu inovasi pendidikan menjadi sebuah keniscayaan. Salah satu pertimbangan inovasi pendidikan adalah merespon adanya gejala bencana alam yang sudah mengancam masa depan keharmonisan lingkungan dan sekaligus umat manusia. Karena kurikulum sebagai komponen penting dalam pendidikan juga menuntut adanya inovasi-inovasi progresif termasuk dalam hal mitigasi bencana, yaitu upaya untuk mengurangi risiko bencana, yang salah satunya melalui upaya penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
 3. Salah satu bentuk mitigasi bencana adalah pentingnya *trauma healing*, yaitu penyembuhan trauma dan rasa takut paska terjadinya bencana baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Karena itu teknik *trauma healing* perlu menjadi pertimbangan bagi upaya inovasi kurikulum terutama bagi pendidikan guru termasuk pendidik guru di bawah PTAIN seperti STAIN Kudus yang di lapangan akan menghadapi anak-anak yang rentan terhadap tekanan (*stress*) akibat kejadian bencana alam yang datang secara tiba-tiba.
 4. Fenomena bencana hanyalah sebagian saja dari berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia dalam dunia pendidikan. Masih terdapat persoalan lain seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan iklim global yang perlu dijadikan pertimbangan dalam inovasi kurikulum di setiap satuan pendidikan dengan tetap mengakar pada nilai-nilai lokal (*local genius*) agar praksis pendidikan terselenggara memperkuat kepribadian budaya bangsa.
 5. Untuk memenuhi tuntutan ini setiap guru harus mampu memerankan dirinya sebagai pengembang kurikulum (*curriculum developer*) dan sekaligus sebagai inovator kurikulum (*curriculum innovator*) termasuk ketika dihadapkan pada proses implementasi kurikulum dalam sekolah darurat akibat bencana. Dengan demikian setiap satuan pendidikan mampu menformulasikan KTSP secara mandiri sesuai potensi sejarah, budaya dan geografisnya masing-masing yang unik.

Daftar Pustaka

- Dewey, J. (2004). *Experience and Education; Pendidikan Berbasis Pengalaman*. Sudarminta (terj.). Bandung. Teraju.
- Fullan, M.G. (1991), *The Meaning Of Education Change*, Theacher Collage Columbia University, New York. 2nd edition. ISBN 0-7744-0357-8
- Hasan, S.H. (tt) *Kurikulum Dan Tujuan Pendidikan*. http://pk.sps.upi.edu/artikel_hamid.html (on line 22 Pebruari 2009)
- Hasan, S.H. "Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan", dalam Ali, M., dkk. (2007). *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung. Pedagogiana Press.
- Hayati, S.H. "Pendidikan Lingkungan Hidup" dalam Ali, M., dkk. (2007). *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung. Pedagogiana Press.
- Husein, M. "Manusia dan Tugas Kosmiknya menurut Islam", dalam Mangunjaya, M, dkk. Eds. (2007). *Menanam Sebelum Kiamat; Islam, Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup*. Jakarta. ICAS.
- Ibrahim. (1988). *Inovasi Pendidikan*. Jakarta. Depdikbud.
- Kartadinata, S. *Terapi dan Pemulihan Pendidikan*, (Bandung: UPI Press, 2009).
- Oliva, P.F. (1992). *Developing the Curriculum*. 4th edition. New York: Longman.
- Paresti, S., dkk. (2008). *Pengembangan Model-Model Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus Pendidikan Non Formal Program Paket A Untuk Daerah Bencana Alam*. Jakarta. Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
- Pranyono, F.E. (2009). *Trauma Healing Pasca Gempa Bumi Sumatra Barat* dalam <http://fauziep.blogdetik.com/2009/10/03/trauma-healing-pasca-gempa-bumi-sumatra-barat/> (on line 8 Oktober 2009)
- Print, M. (1993). *Curriculum Development and Design*. St. Leonard: Allen & Unwin Pty, Ltd.
- Rogers, E.M. (1983). *Diffusion of Innovation*. London: The Free Press.

- Rubaidi. (2010). "Bencana dalam Konstruksi Pemikiran Fiqh Kyai." Dalam *Konferensi Hibah Penelitian Interpretasi dan Respons atas Bencana Alam.*. Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarja UGM Yogyakarta, 11 Maret 2010.
- Rudduck, J. (1991), *Innovation and Change*, Philadelphia. Open University Press ISBN 0-335-09580-1
- Said, N. (2010). "Strategi Saminisme dalam Membendung Bencana Alam; Perlawanan *Sedulur Sikep* terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Sukolilo Pati." Dalam *Konferensi Hibah Penelitian Interpretasi dan Respons atas Bencana Alam.* Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarja UGM Yogyakarta, 11 Maret 2010.
- Said, N. (2010). *Jejak Perjuangan Sunan Kudus dalam Membangun Karakter Bangsa*. Bandung. Brillian Media Utama.
- Schiraldi, G.R. (2000). *Post-Traumatic Stress Disorder Sourcebook: A Guide to Healing, Recovery and Growth* (Sourcebooks). (Paperback)
- Sommers, M. (2003). "The Education Imperative: Supporting Education in Emergencies." Washington, DC: Academy for Educational Development, and New York: Women's Commission for Refugee Women and Children, dalam www.aed.org/ToolsandPublications/upload/EducationImperative.pdf (on line 8 Oktober 2009).
- Tilaar, H.A.R.(1985). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Unruh, G.G. & Unruh, A. (1984). *Curriculum Development: Problems, Processes, and Progress*. Berkeley, California: McCutchan Publishing Corporation
- Woodhouse, J.L. & Knapp, C. E. *Place-Based Curriculum and Instruction: Outdoor and Environmental Education Approaches*, 2000; <http://www.ericdigests.org/2001-3/place.htm> (online, 10 September 2008)
- 11 Kab/Kota Terapkan Kurikulum Bencana (2 Februari 2011) dalam <http://aceh.tribunnews.com/news/view/45931/11-kab-kota-terapkan-kurikulum-bencana> (diakses 1 Februari 2011).